



PT. BPR
**Artha
Nugraha**

ANNUAL REPORT

LAPORAN TAHUNAN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pemegang Saham Yang Terhormat,

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Anugerah-Nya PT. BPR Artha Nugraha dapat melalui tahun 2024 dengan cukup baik. Atas nama Direksi perkenankan kami menyampaikan pencapaian kinerja tahun 2024.

Kinerja PT. BPR Artha Nugraha selama tahun 2024 ditutup dengan kinerja yang cukup menggembirakan, ditengan tengah tantangan ekonomi yang cukup berat, pencapaian kinerja baik dari sisi volume usaha (aset), simpanan dan ekuitas secara umum dapat tercapai. Volume usaha (aset) akhir tahun 2024 meningkat sebesar Rp. 1.492.684 ribu (4,79%) dari sebesar Rp. 31.130.056 ribu menjadi Rp. 32.622.739 ribu. Kredit yang diberikan naik sebesar Rp. 1.237.214 ribu (6,35%) dari Rp. 19.470.712 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024. Tabungan meningkat sebesar Rp. 5.664 ribu (0,05%) dari Rp. 10.472.851 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024. Deposito meningkat sebesar Rp. 1.360.300 ribu (10,78%) dari Rp. 12.623.500 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024. Sedangkan laba operasional turun sebesar Rp. 262.112 ribu (18,83%) dari sebesar Rp. 1.392.283,- pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 1.130.171,- pada akhir tahun 2024. Dan laba tahun berjalan turun sebesar Rp. 279.992 ribu (18,83%) dari sebesar Rp. 1.416.273 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 1.136.281 ribu pada akhir tahun 2024. Laba bersih turun sebesar Rp. 247.984 ribu (19,82%) dari sebesar Rp. 1.250.882 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 1.002.897 ribu pada akhir tahun 2024.

Dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, PT. BPR Artha Nugraha telah mengikut sertakan personilnya di berbagai bidang pelatihan mulai dari staf sampai dengan tingkat Direksi, baik pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain maupun inhouse training seluruh karyawan,

Di bidang tanggung jawab sosial PT. BPR Artha Nugraha secara kontinue telah memberikan bantuan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat tidak mampu disekitar domisili kantor pusat dan kantor kas yang dibagikan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan memberikan paket sembako murah (subsidi harga) kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 oktober 2024 sebanyak 400 paket.

Dibidang Ekuitas, jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp. 94.700 ribu (1,33%) dari Rp. 7.135.411 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 7.230.111 ribu pada akhir tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/15 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, modal inti ditetapkan sekurang kurangnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- Jumlah Modal inti PT. BPR Artha Nugraha pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.728.662 ribu sedangkan rasio CAR PT. BPR Artha Nugraha pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 51,29%.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pemegang Saham, Komisaris, Direktur dan karyawan PT. BPR Artha Nugraha atas dukungan dan dedikasinya dalam mengembangkan PT. BPR Artha Nugraha. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Kepemilikan

SAHAM

No	Nama	Jumlah (Rp. 000)	%
1	H. Abd. Hafidz Izzudin	1.368.000	30,80 %
2	Nugroho Adi Waspodo	859.000	19,34 %
3	KOPKAR Karya Nugraha	827.000	18,62 %
4	Ronny Siswanto	298.000	6,71 %
5	Puthut Setyo Nugroho	289.000	6,51 %
6	KPRI Sadar	207.000	4,66 %
7	KPRI AI-Inayah	178.000	4,01 %
8	KUD Sri Handayani	171.000	3,85 %
9	KUD Sri Rejeki	100.000	2,25 %
10	KUD Tulus Bhakti	94.000	2,12 %
11	KUD Sri Gati	50.000	1,13 %
	Jumlah	4.441.000	100 %

Riwayat Pendirian

SEJARAH

PT. BPR ARTHA NUGRAHA adalah Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri paling utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk. Berdirinya PT. BPR Artha Nugraha memanfaatkan regulasi PAKTO 28 Oktober 1988.

Awalnya PT. BPR ARTHA NUGRAHA didirikan oleh gerakan Koperasi di Kabupaten Kediri dengan Badan Hukum Koperasi dengan nama Koperasi bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Artha Nugraha, SK Badan Hukum Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Timur NO.6776/BH/II/90 tertanggal 21 Nopember 1990, Ijin Prinsip Menteri Keuangan No.S-1532/MK.13/1990 tertanggal 27 Desember 1990, surat dari Bank Indonesia tentang Persiapan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat tertanggal 25 April 1991 dan Ijin Usaha Menteri Keuangan No.Kep-179/KM.13/1991 tertanggal 8 Juli 1991.

Setelah mendapat Ijin Usaha dari Menteri Keuangan, KBPR Artha Nugraha secara resmi beroperasi pada tanggal 9 Oktober 1991. Namun dalam perkembangannya melalui Rapat Anggota Khusus KBPR Artha Nugraha pada tanggal 28 April 2009 diputuskan untuk merubah bentuk hukum dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. BPR Artha Nugraha adalah Akta No. 67 tertanggal 18 Agustus 2009 dibuat Notaris Gagarina Dwi Wahyuningtyas, SH dan mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.61803.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2009 dan pada tanggal 1 Maret 2010 mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No.12/2/SK.PBI/2010 tentang Persetujuan Pengalihan Penggunaan Ijin Usaha dari Badan Hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha selanjutnya secara resmi pada tanggal 10 Maret 2010 mengumumkan perubahan Badan Hukum dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terkait Perubahan Nama BPR yang harus memenuhi peraturan perundang-undangan maka diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPR Artha Nugraha pada tanggal 03 Oktober 2024 untuk melakukan perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Nugraha menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Artha Nugraha sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2024 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0063704.AH.01.02.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perekonomian Rakyat Artha Nugraha.

Pada awal pendirian, PT. BPR Artha Nugraha berkedudukan di Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri satu lokasi dengan KUD Nugroho, Kemudian pada tanggal 2 Juli 1997 pindah kantor di Jl. Raya No. 99 Purwoasri, Kab. Kediri selanjutnya sejak tanggal 20 Mei 2009 menempati Gedung Kantor milik sendiri di Jl. Raya No. 109A Purwoasri, Kab. Kediri.



Visi & Misi

VISI

Menjadi BPR yang mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan



PT. BPR
Artha
Nugraha

MISI

- **Menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip kehati-hatian**
- **Setiap tahun harus mampu untuk tumbuh**
- **Menjaga rasio-rasio keuangan secara sehat**
- **Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku**
- **Menjaga tingkat kesehatan BPR untuk berada pada posisi sehat**

Pengurus

KOMISARIS



Komisaris

H. Abd. Hafidz Izzudin, lahir di Kediri pada tanggal 1 April 1945, bergabung dengan BPR Artha Nugraha sejak tahun 1991. Beliau adalah guru Agama di MTSN Purwoasri sejak tahun 1980 dan pensiun pada tahun 2005. Disamping itu beliau juga mengajar di MA Al-Hikmah Purwoasri sebagai guru Agama sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 dan sampai saat ini juga masih mengajar di MA Al-Hikmah Purwoasri sebagai guru honorer. Beliau juga sebagai Pengurus pendiri KPRI Al-Inayah Purwoasri dan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai ketua. Beliau juga sebagai Pengurus Pendiri BPR Artha Nugraha dan sebagai Komisararis sejak BPR Artha Nugraha berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.

DIREKSI



Direktur Utama

Nugroho Adi Wasposito, SE, lahir di Kediri pada tanggal 4 Pebruari 1967, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Manajemen Keuangan di STIE Malang Kucecwara di Malang sampai dengan tahun 1990. Jenjang karier di BPR Artha Nugraha dimulai sejak tahun 1991 sebagai Staff Account Officer dan diangkat sebagai Direktur Utama sejak 1 April tahun 1993 sampai sekarang.



Direktur

Siti Uma'iyah, SE, lahir di Kediri pada tanggal 25 Oktober 1971, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Ekonomi Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Pawayatan Dhaha Kediri sampai dengan tahun 2001. Masuk di BPR Artha Nugraha sejak tahun 1991 mulai sebagai Staff Service Assisten, Bagian Tabungan & Deposito, Kasir dan Administrasi Kredit dan diangkat sebagai Direktur sejak 15 Januari 2001 hingga sekarang. Dan sejak 28 Juni 2018 diangkat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif

MARKETING



Kepala Bagian Marketing

Wawan Yuliadi Thohari, SE, lahir di Kediri pada tanggal 9 Pebruari 1981, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Kediri, Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas di Nganjuk dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Negeri Jember sampai dengan tahun 2003. Jenjang karier di BPR Artha Nugraha dimulai sejak tahun 2004 sebagai Staff Account Officer, Kepala Kantor Kas dan diangkat sebagai Kepala Bagian Marketing sejak 3 Januari tahun 2011 sampai sekarang.

OPERASIONAL



Kepala Bagian Operasional

Mega Damay Priawan, ST, lahir di Kediri pada tanggal 14 Maret 1987, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Teknology Industri jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sampai dengan tahun 2009. Bekerja di PT Bank Sinarmas sebagai Marketing sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Kemudian sejak tahun 2011 bekerja di Bank Muamalat dengan posisi jabatan terakhir sebagai Relationship Manager dan PIC Mobil Branch sampai dengan tahun 2022. Sejak bulan September 2022 bergabung di PT BPR Artha Nugraha sebagai PE Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APU & PPT. Dan sejak 25 Mei 2023 diangkat sebagai Kepala bagian operasional dan sejak 22 Desember 2024 merangkap jabatan sebagai PE TI.

AUDIT INTERNAL

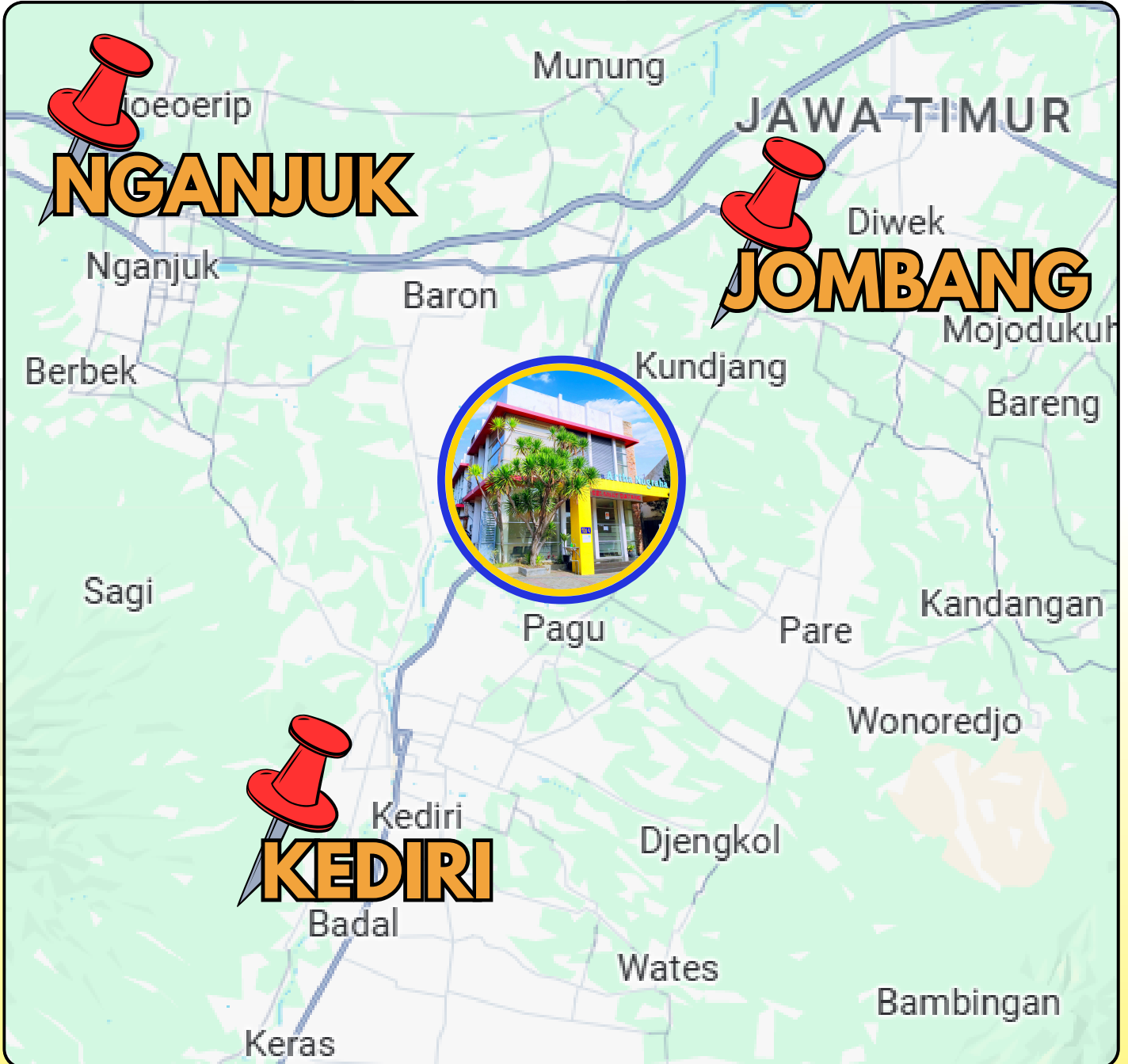


Audit Internal

Arif Miftahul Abror, S. Th. I, M. Ag, lahir di Kediri pada tanggal 13 Maret 1990, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas di Kediri dan melanjutkan study S1 di Fakultas Ushuludin dan Ilmu Sosial jurusan Tafsir Hadits di STAIN Kediri sampai dengan tahun 2013. Kemudian menyelesaikan study S2 di Fakultas Ilmu Ushuludin, Adab dan Dakwah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Tulungagung pada tahun 2020. Sebagai Staf Pengajar di MTsN 3 Kediri dan MAN 2 Kediri sampai tahun 2020. Bergabung di BPR Artha Nugraha sejak September tahun 2021 sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern sampai sekarang.

Jangkauan Bisnis

MAPING



IKHTISAR DATA KEUANGAN

1. Volume Usaha

Volume usaha sampai dengan akhir tahun 2024 naik sebesar Rp.1.492.684 ribu atau naik sebesar 4,79% dari Rp.31.130.055 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.32.622.739 ribu pada akhir tahun 2024. Pada sisi aset, terdapat peningkatan penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan dan aset lain-lain. Sedangkan pada posisi Liabilitas dan Ekuitas, dana pihak ketiga dan ekuitas meningkat.

Adapun perkembangan volume usaha tahun 2023 dan tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2024 (Rp.000)	2023 (Rp.000)
Aset	32.622.739	31.130.056
Penempatan pada bank lain	11.107.552	10.574.196
Kredit yang diberikan	20.707.552	19.470.712
Dana pihak ke tiga	24.461.816	23.095.851

2. Aset Produktif

Perkembangan aset produktif dalam penempatan pada bank lain sampai akhir tahun 2024 naik sebesar Rp.533.356 ribu (9,47%) dari sebesar Rp. 10.574.196 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.11.107.552 ribu pada akhir tahun 2024. Sedangkan kredit yang diberikan naik sebesar Rp.1.237.214 ribu atau 6,35% dari Rp.19.470.712 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024.

3. Pendanaan

Disisi penghimpunan dana masyarakat tahun 2024 tabungan naik sebesar Rp. 5.664 ribu atau naik 0,05% dari Rp.10.472.851 ribu pada akhir tahun 2023 naik menjadi Rp.10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024, sedangkan deposito naik sebesar Rp.1.360.300 ribu atau naik 10,78% dari Rp.12.623.500 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024. Pinjaman yang diterima turun sebesar Rp.33.333 ribu atau turun 100% dari sebesar Rp.33.333 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.0 ribu pada akhir tahun 2024.

Adapun perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2024 dan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2024 (Rp.000)	2023 (Rp.000)
Tabungan	10.478.516	10.472.851
Deposito	13.983.300	12.623.500
Pinjaman dari bank lain	0	33.333
Simpanan dari bank lain	550.000	550.000

4. Laba Rugi

Pendapatan operasional tahun 2024 naik sebesar Rp.45.307 ribu atau naik sebesar 0,89%, dari Rp.5.067.264 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 5.112.572 ribu pada akhir tahun 2024, sedangkan biaya operasional naik sebesar Rp.307.420 ribu atau naik 8,37% dari Rp. 3.674.981 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.3.982.401 ribu pada akhir tahun 2024.

Laba operasional tahun 2024 turun sebesar Rp.262.112 ribu atau turun sebesar 18,83% dari sebesar Rp.1.392.283 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.130.171 ribu pada akhir tahun 2024, sedangkan pendapatan non operasional sebesar Rp.10.480 ribu dan biaya non operasional sebesar Rp.10.480 ribu sehingga diperoleh laba tahun berjalan turun sebesar Rp.279.992 ribu atau turun 19,77% dari sebesar Rp.1.416.273 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.1.136.281 ribu pada akhir tahun 2024 dan Taksiran pajak penghasilan sebesar Rp.133.384 ribu, sehingga diperoleh Laba setelah taksiran pajak sebesar Rp.1.002.897 ribu pada akhir tahun 2024 atau naik sebesar Rp.133.384 ribu atau turun sebesar 19,82% dari akhir tahun 2023.

Adapun perkembangan pendapatan, beban dan laba tahun 2024 dan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut :

Keterangan	2024 (Rp.000)	2023 (Rp.000)
Pendapatan Bunga	4.782.185	4.906.610
Pendapatan Operasional Lainnya	330.387	160.655
Pendapatan Non Operasional	10.480	28.740
Beban Bunga	1.221.772	1.144.745
Beban PPAP	188.696	70.160
Beban Pemasaran	11.450	10.834
Beban Administrasi dan Umum	2.508.557	2.402.784
Beban Oprasional Lainnya	51.927	46.458
Beban Non Operasional	4.370	4.750
Laba Sebelum Pajak	1.136.281	1.416.273
Taksiran Pajak	133.384	165.392
Laba Bersih	1.002.897	1.250.882

KUALITAS ASET PRODUKTIF & RASIO KEUANGAN

1. Kualitas Asset Produktif

Jumlah baki debit kredit non lancar tahun 2024 naik sebesar Rp. 1.291.611 ribu atau naik sebesar 8,17% dari sebesar Rp.1.515.735ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.2.883.015 ribu pada akhir tahun 2024. Dan rasio NPL (netto) tahun 2024 naik sebesar 5,47% dari sebesar 6,16% pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar 11,63% pada akhir tahun 2024

Jumlah aset produktif dan kualitasnya periode Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut (dalam ribuan):

Keterangan	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	11.107.552	0		0	0	11.107.552
2. Kredit yang diberikan						
- Kpd pihak terkait	13.839	0		0	0	13.839
- Kpd pihak tdk terkait	16.476.720	1.334.352	19.269	1.171.716	1.692.031	20.694.087
3. Jumlah aset produktif	27.598.111	1.334.352	19.269	1.171.716	1.692.031	31.815.478
4. -/-PPAP Kredit Yang Diberikan	(87.154)	(2.840)	(287)	(2.155)	(471.737)	(564.172)
5. Npl Gross						13,92%
6. Npl Net						11,63%

2. *Rasio-rasio Keuangan*

Rasio-rasio keuangan periode Desember 2024 dan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	2024	2023
1	Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	51,29%	50,91%
2	Rasio Modal Inti (MIAPB)	279,33%	543,14%
3	Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100%	118,10%
4	Rasio Non Performing Loan (NPL) Neto	11,63%	6,16%
5	Rasio Return on Assets (ROA)	3,62%	4,79%
6	Rasio Net Interest Margin (NIM)	11,74%	13,29%
7	Rasio Biaya (BOPO)	72,52%	72,52%
8	Rasio Loan Depocit Ratio (LDR)	84,65%	84,30%
9	Rasio Alat Likuid (CR)	18,30%	28,53%

3. *Penjelasan Npl*

Penyebab utama kondisi NPL adalah karena masih tingginya kredit bermasalah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor eksternal yaitu penurunan ekonomi yang menyebabkan menurunnya usaha Debitur sehingga mengurangi kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran pinjaman sesuai jadwal yang diperjanjikan.

Langkah penyelesaian akan terus dilakukan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah dan meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas.

4. *Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain*

Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Secara Signifikan

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP Moh. Wildan dan Adi Darmawan untuk tahun buku 2024 secara umum kinerja PT BPR Artha Nugraha meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian volume usaha per 31 Desember 2024 dibandingkan periode 31 Desember 2023 yang meningkat sebesar 4,79% dari sebesar Rp.31.130.056 ribu menjadi sebesar Rp.32.622.739 ribu. Pada sisi asset terdapat peningkatan terutama pada kredit yang diberikan sebesar Rp.1.237.214 ribu atau sebesar 6,35% dari sebesar Rp.19.470.712 ribu menjadi sebesar Rp.20.707.926 ribu. Pada sisi liabilitas terdapat peningkatan terutama pada simpanan sebesar Rp.1.361.748 ribu atau sebesar 5,90% dari sebesar Rp.23.094.517 ribu menjadi sebesar Rp.24.456.265 ribu. Perkembangan hasil usaha pada akhir tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023, hal ini terlihat dari laba bersih sebelum pajak turun sebesar Rp.279.992 ribu atau sebesar 19,77% dari sebesar Rp.1.416.273 ribu menjadi sebesar Rp.1.136.281 ribu.

Perubahan Penting Lain

Selain pencapaian keuangan, dalam tahun 2024 terjadi perubahan kepemilikan dan perubahan komposisi kepemilikan PT BPR Artha Nugraha. Adapun perubahan dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

Kepemilikan Lama			Kepemilikan Baru		
No.	Nama Pemilik	%	No.	Nama Pemilik	%
1	H. Abd. Hafidz Izzudin	30,41	1	H. Abd. Hafidz Izzudin	30,80
2	Nugroho Adi Waspodo	19,09	2	Nugroho Adi Waspodo	19,34
3	KOPKAR Karya Nugraha	18,40	3	KOPKAR Karya Nugraha	18,62
4	Puthut Setyo Nugroho	6,44	4	Ronny Siswanto	6,71
5	KUD Sri Rejeki	5,13	5	Puthut Setyo Nugroho	6,51
6	KPRI Sadar	4,60	6	KPRI Sadar	4,66
7	KPRI Al-Inayah	4,09	7	KPRI Al Inayah	4,01
8	Rudy Siswanto	3,93	8	KUD Sri Handayani	3,85
9	KOPONTREN Nasrun	2,92	9	KUD Sri Rejeki	2,25
10	KUD Tulus Bhakti	2,16	10	KUD Tulus Bakti	2,12
11	KUD Sri Handayani	1,73	11	KUD Sri Gati	1,13
12	KUD Sri Gati	1,10			

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENAJEMEN

Sebagai industri yang bergerak dibidang keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, BPR Artha Nugraha akan terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, melalui upaya peningkatan kemampuan staff marketing dan penggunaan teknologi informasi yang telah terintegrasi dan secara kontinue melakukan promosi melalui berbagai media diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dana masyarakat dan juga pertumbuhan kredit yang diberikan.

Dilandasi semangat untuk menjadi BPR yang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan berdasarkan prinsip kehati-hatian maka pengelolaan resiko merupakan hal yang amat penting untuk mendukung kesinambungan usaha BPR Artha Nugraha dimasa yang akan datang.

Kebijakan Pengelolaan Resiko

Berikut ini kebijakan yang menyangkut pengelolaan resiko adalah sbb:

1. Resiko Kredit

Beberapa hal yang menjadi fokus dalam mengantisipasi resiko kredit:

- a. Proses kredit yang terhindar dari moral hazard.
- b. Fokus kepada kredit usaha mikro dan kecil dan 80% portofolio kredit untuk kredit modal kerja.
- c. Pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan.
- d. Portofolio kredit dibagi sebesar 65% berupa kredit dengan angsuran dan sisanya 45% berupa kredit tanpa angsuran.
- e. Menerapkan kebijakan bank cheking melalui SLIK OJK dalam pembuatan analisa kredit.

2. Resiko Likuiditas

Untuk menghindari kesulitan dalam penyediaan likuiditas kebijakan yang diterapkan adalah senantiasa memonitor kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dan memelihara cash ratio secara cukup.

3. *Resiko Operasional*

Dalam mengantisipasi resiko operasional ditekankan pada pemisahan fungsi antara pelaksana transaksi dan pencatat transaksi, menerapkan batasan/limit transaksi sesuai kewenangan masing-masing petugas, selain itu juga kami telah menggunakan sistem komputer dengan sistem yang terintegrasi.

4. *Resiko Hukum*

Hal-hal yang telah dilakukan untuk mengantisipasi resiko hukum dengan memperbaiki kepastian hukum perjanjian kredit dan pengikatan agunan dimana dibuat kebijakan plafon pinjaman mulai Rp.15.000 ribu (untuk kredit dengan agunan barang bergerak) dan mulai Rp.10.000 ribu (untuk kredit dengan agunan barang tidak bergerak) pengikatan agunan dilakukan secara notariil dan dilakukan pendaftaran fidusia pemasangan hak tanggungan manakala debitur mulai kelihatan bermasalah.

5. *Resiko Reputasi*

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam usaha pembiayaan kredit mikro, maka reputasi menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik, pengelolaan keluhan nasabah contohnya harus direspon secara cepat dan tepat, indikator mengukur resiko reputasi yang digunakan sebagai ukuran dalam mengukur tinggi rendahnya resiko reputasi adalah dengan menghitung berapa banyak komplain nasabah dan sejauh mana penyelesaian komplain tersebut. Disamping itu manajemen juga senantiasa menekankan kepada semua karyawan untuk selalu menjaga integritasnya. Dalam mengantisipasi resiko operasional ditekankan pada pemisahan fungsi antara pelaksana transaksi dan pencatat transaksi, menerapkan batasan/limit transaksi sesuai kewenangan masing-masing petugas, selain itu juga kami telah menggunakan sistem komputer dengan sistem yang terintegrasi.

LAPORAN MANAJEMEN

Tata Kelola PT. BPR Artha Nugraha

Penerapan Tata Kelola Yang Baik sesuai dengan pilar-pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) akan menjadikan BPR dapat dikelola secara profesional dalam menjalankan roda operasional secara efisien serta mampu memperkecil resiko bisnis ke depan.

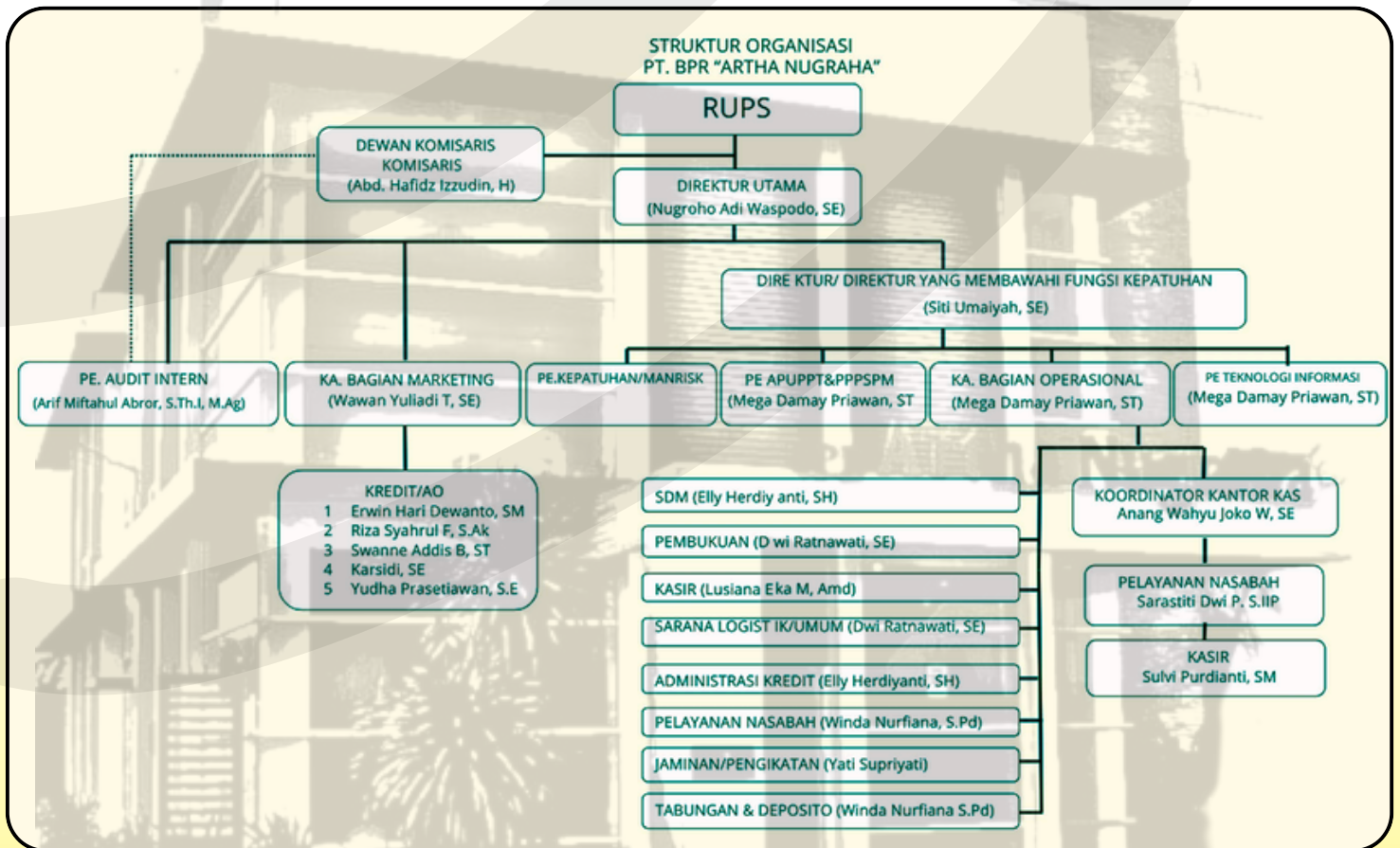
1. *Struktur Organisasi*

Untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik diperlukan struktur organisasi yang dapat menunjang pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan dapat memisahkan fungsi-fungsi organisasi dengan tepat.

Dan struktur organisasi PT. BPR Artha Nugraha tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

PELAKSANA



Produk

JASA KEUANGAN



PT. BPR Artha Nugraha

Simpanan Tabungan **Tamasya**

Tamasya
TAMBAH BAKTI BERTAMBAH DEKA

The image shows three green savings cards with the Artha Nugraha logo. The background features a man holding a white goat, another man with a hat, and a woman in a field with mountains in the distance.



PT. BPR Artha Nugraha

Simpanan Tabungan **Tabunganku**

The image shows three orange savings cards with a floral pattern and the Artha Nugraha logo. The background features three young women in school uniforms holding books in front of a school building.



PT. BPR Artha Nugraha

Simpanan Deposito **NUGRAHA**

DEPOSITO NUGRAHA
SIMPANAN AMAN & TERJAMIN LPS

The image shows three blue savings cards with the Artha Nugraha logo. The background features a man and a woman in a field looking at a tablet, with a large greenhouse structure behind them.



PT. BPR Artha Nugraha

MODAL KERJA
KREDIT UNTUK PERMODALAN USAHA

The image shows three savings cards with various backgrounds: a construction site with a yellow excavator, a man holding a large fish, and a man with a hat holding a bundle of hay.



PT. BPR Artha Nugraha

KONSUMSI
KREDIT UNTUK SEGALA KEBUTUHAN

The image shows three savings cards with backgrounds of a Mitsubishi Motors dealership, a woman on a white scooter, and a young boy in a school uniform holding a pink envelope.



PT. BPR Artha Nugraha

INVESTASI
KREDIT UNTUK INVESTASI MENGUNTUNGAN

The image shows three savings cards with backgrounds of a man in a red shirt working on a bus, a modern city skyline, and a yellow dump truck on a construction site.

2. Bidang Usaha

Bidang usaha PT. BPR Artha Nugraha sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (PPSK) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit dan melakukan kegiatan transfer dan serta menempatkan dana pada bank lain.

3. Teknologi Informasi

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien maka sejak tahun 2011 telah menggunakan teknologi informasi dengan sistim yang lebih terintegrasi dengan memakai system dari PT. Mars technology. Dan sejak bulan Nopember 2021 untuk maintenance dan pengembangan Core Banking System PT BPR Artha Nugraha bekerjasama dengan PT. Masrtech Global. Nama Core Banking System yang digunakan Banking.net dengan system operasi Linux Ubuntu Server, Database MySQL Server, bahasa yang digunakan PHP & Java Script, perangkat keras yang digunakan Dell T440. Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk kantor pusat Wifi dan LAN, untuk kantor kas menggunakan media flashdisk. Sedangkan untuk pengamanan data dilakukan backup di server dan flashdisk.

4. Perkembangan dan Target Pasar

PT. BPR Artha Nugraha selama beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan. Berikut adalah beberapa poin utama perkembangan dan target pasar PT. BPR Artha Nugraha:

a. Perkembangan Usaha:

1) Volume Usaha

Volume usaha sampai dengan akhir tahun 2024 naik sebesar Rp.1.492.684 ribu atau naik sebesar 4,79% dari Rp.31.130.055 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.32.622.739 ribu pada akhir tahun 2024. Pada sisi aset, terdapat peningkatan penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan dan aset lain-lain. Sedangkan pada posisi Liabilitas dan Ekuitas, dana pihak ketiga dan ekuitas meningkat.

2) Aset Produktif

Perkembangan aset produktif dalam penempatan pada bank lain sampai akhir tahun 2024 naik sebesar Rp. 533.356 ribu (9,47%) dari sebesar Rp.10.574.196 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 11.107.552 ribu pada akhir tahun 2024. Sedangkan kredit yang diberikan naik sebesar Rp. 1.237.214 ribu atau 6,35% dari Rp. 19.470.712 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 20.707.926 ribu pada akhir tahun 2024.

Adapun perkembangan Aset produktif/penyaluran dana tahun 2024 dapat ditabulasikan srbagai berikut:

Keterangan	2024	2023
Penempatan pada bank lain		
Giro	27.986	1.011.263
Tabungan	4.199.566	5.382.933
Deposito	6.880.000	4.180.000
Jumlah penempatan pada bank lain	11.107.552	10.574.196

Kredit yang diberikan		
Pinjaman Installment	11.787.606	10.859.392
Pinjaman Reguler	8.649.700	8.611.320
Jumlah kredit yang diberikan	20.707.926	19.470.712
Jumlah aset produktif	31.815.478	30.044.908

3) Pendanaan

Disisi penghimpunan dana masyarakat tahun 2024 tabungan naik sebesar Rp. 5.664 ribu atau naik 0,05% dari Rp.10.472.851 ribu pada akhir tahun 2023 naik menjadi Rp.10.478.516 ribu pada akhir tahun 2024, sedangkan deposito naik sebesar Rp.1.360.300 ribu atau naik 10,78% dari Rp.12.623.500 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi Rp.13.983.300 ribu pada akhir tahun 2024. Pinjaman yang diterima turun sebesar Rp.33.333 ribu atau turun 100% dari sebesar Rp.33.333 ribu pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar Rp.0 ribu pada akhir tahun 2024.

Perkembangan pendanaan tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Keterangan	2024	2023
Tabungan		
Tabungan Tamasya	6.620.728	7.106.803
Tabungan Taksasi	2.559.570	2.580.152
Tabungan TabunganKu	1.298.218	785.896
Jumlah Tabungan	10.478.516	10.472.851
Deposito		
Jangka waktu 1 bulan	702.000	450.000
Jangka waktu 3 bulan	4.593.300	4.228.500
Jangka waktu 6 bulan	5.543.000	5.237.500
Jangka waktu 12 bulan	3.145.000	2.707.000
Jumlah Deposito	13.983.300	12.623.500
Pinjaman dari bank lain	0	33.333
Jumlah Pendanaan	24.461.816	23.129.185

b. Target Pasar

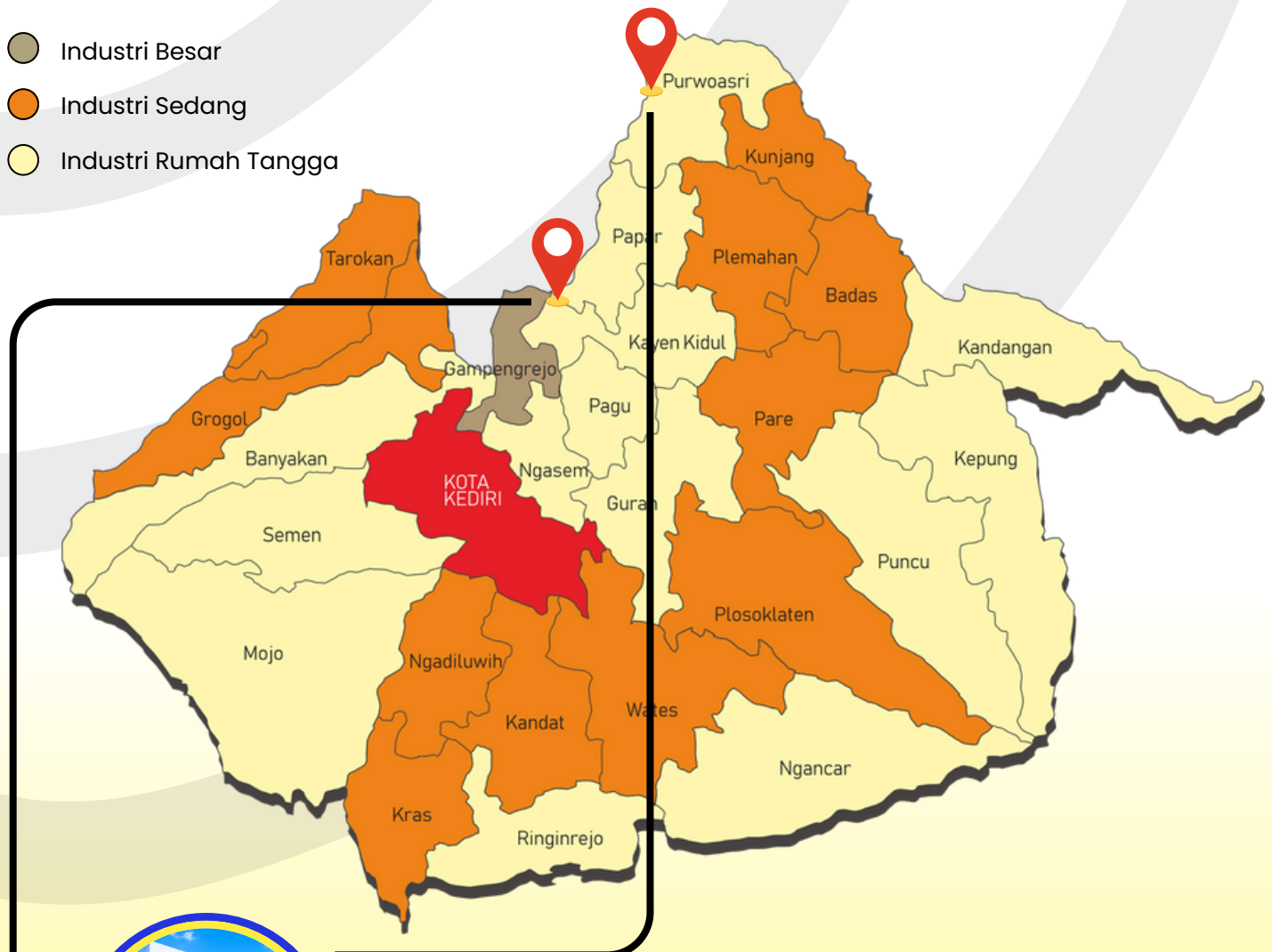
Dalam operasional PT. BPR Artha Nugraha focus melayani masyarakat di wilayah kabupaten Kediri dan wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Kediri yaitu kabupaten Jombang dan kabupaten Nganjuk. Dan PT. BPR Artha Nugraha menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil sebagai Upaya untuk penyebaran resiko kredit.

Jaringan Kantor

KANTOR

PT. BPR Artha Nugraha berada di wilayah Kabupaten Kediri

- Industri Besar
- Industri Sedang
- Industri Rumah Tangga



Kantor Pusat

Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri Kab. Kediri 64154
Telp. (0354) 529145 Email: arnugkdr@yahoo.com
www.bprarthanugraha.com



Kantor Kas

Jl. Raya Minggiran 76 A Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri 64183
Telp. (0354) 526481

5. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor BPR Artha Nugraha ada 2 kantor, yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 1 kantor kas, kantor pusat berlokasi di jalan raya No. 109A Purwoasri Kabupaten Kediri dan kantor kas jalan raya Minggiran No. 76A Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

6. Kerjasama BPR dengan Lembaga Lain

No	Nama Jasa	Jenis Jasa	Detail Kerjasama
1	Mars Tech Global	Teknologi Informasi	Penyedia layanan Teknologi Informasi Perbankan secara komputerisasi
2	Kantor Notari dan PPAT <i>Miando Pasuna Parapat</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
3	Kantor Notari dan PPAT <i>Yanuar Rozi Firmansyah</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
4	Kantor Notari dan PPAT <i>Eritna Siska</i>	Notaris dan PPAT	Pengikatan dan Pembuat Akta
5	Radar Kediri	Media Masa Koran	Publikasi Informasi Media Cetak
6	Memorandum	Media Masa Koran	Publikasi Informasi Media Cetak
7	PLN	Penyedia Listrik	Mensuplay Listrik Kantor Pusat dan Kas
8	Telkom	Internet	Penyedia media jaringan Internet Speedy
9	Bank Jatim	PBL	Penempatan Dana dan Sarana Mobile Banking
10	Bank Danamon	PBL	Penempatan Dana dan Sarana Mobile Banking
11	Bank Permata	PBL	Penempatan Dana dan Sarana Mobile Banking

7. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM PT. BPR Artha Nugraha adalah 24 orang yang terdiri dari 2 Direksi dan 21 Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S2) berjumlah 1 orang, (S1) berjumlah 13 orang, D3 berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 6 orang.

Untuk menunjang pengembangan usaha, maka peningkatan kualitas SDM adalah merupakan hal yang harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM BPR Artha Nugraha telah dilakukan dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Perbarindo dan pihak-pihak lain.

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor yang utama dalam meningkatkan kinerja, selain gaji pokok, juga diberikan tunjangan kesejahteraan lain yang meliputi tunjangan jabatan bagi karyawan golongan tertentu, tunjangan makan siang, tunjangan transport, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan termasuk Jaminan Pensiun dan BPJS Kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan insentif, tunjangan operasional dan tunjangan akhir tahun jika rencana kerja tercapai, dana pensiun intern dan bonus dari laba bersih.

8. Remunerasi

Kebijakan pemberian gaji bagi anggota Direksi dan Komisaris dibahas pada saat pembuatan Rencana Bisnis Bank dan kenaikan gaji anggota Direksi dan Komisaris dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BPR ARTHA NUGRAHA Posisi : 31 DESEMBER 2024		
ASET	POSISI DESEMBER 2024	POSISI DESEMBER 2023
Kas dalam Rupiah	268,722,300	215,604,800
Kas Dalam Valuta Asing	0	0
Surat berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	11,107,551,878	10,574,196,356
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	5,150,000	
Jumlah	11,102,401,878	10,574,196,356
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - Pihak Terkait	0	0
d. Kepada non bank - Pihak Tidak Terkait	20,707,926,177	19,470,712,043
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	559,022,489	471,188,293
Jumlah	20,148,903,688	18,999,523,750
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Properti Terbengkelai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	1,384,909,697	1,384,909,697
b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	649,984,435	598,090,195
c. Inventaris	1,573,620,720	1,530,581,720
b. Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	1,191,152,160	1,097,292,032
Aset Tidak Berwujud	42,550,000	42,550,000
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai -/-	23,185,426	18,679,174
Aset lainnya	333,646,945	429,949,264
TOTAL ASET	32,622,739,163	31,130,055,552
LIABILITAS	POSISI DESEMBER 2024	POSISI DESEMBER 2023
Liabilitas Segera	112,502,283	71,352,678
Simpanan		
a. Tabungan	10,478,515,702	10,472,851,236
b. Deposito	13,977,749,162	12,621,665,971
Simpanan Dari Bank Lain	550,000,000	550,000,000
Pinjaman yang Diterima	0	33,087,792
Dana Setoran Modal - Kewajiban	0	0
Liabilitas lainnya	273,860,821	245,686,416
TOTAL LIABILITAS	25,392,627,968	23,994,644,093
EKUITAS	POSISI DESEMBER 2024	POSISI DESEMBER 2023
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	5,000,000,000	5,000,000,000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	559,000,000	652,000,000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	1,000,000,000	1,000,000,000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	786,213,717	536,529,704
b. Tahun Berjalan	1,002,897,476	1,250,881,756
TOTAL EKUITAS	7,230,111,193	7,135,411,460

LAPORAN LABA RUGI

LAPORAN LABA RUGI PT BPR ARTHA NUGRAHA Posisi : 31 DESEMBER 2024		
POS	POSISI DESEMBER 2024	POSISI DESEMBER 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	4,373,362,952	4,531,159,044
b. Provisi Kredit	408,821,840	375,450,675
c. Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	4,782,184,792	4,906,609,719
Pendapatan Lainnya	330,387,268	160,654,890
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5,112,572,060	5,067,264,609
Beban Bunga		
a. Bunga Kontraktual	1,216,753,894	1,133,120,990
b. Biaya Transaksi -/-	5,017,928	11,623,936
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	188,696,113	70,159,638
Beban Pemasaran	11,449,500	10,834,000
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	2,508,556,552	2,402,784,214
Beban lainnya	51,926,933	46,458,499
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3,982,400,920	3,674,981,277
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,130,171,140	1,392,283,332
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional		
Beban Non Operasional	10,480,000	28,740,000
Kerugaian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	4,370,000	4,750,000
LABA RUGI NON OPERASIONAL	6,110,000	23,990,000
LABA(RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,136,281,140	1,416,273,332
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	133,383,663	165,391,575
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN		
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,002,897,477	1,250,881,757
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,002,897,477	1,250,881,757

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	MODAL DISETOR	CADANGAN	LABA/RUGI	JUMLAH EKUITAS
Saldo 31 Desember 2022	4,348,000,000	1,000,000,000	1,787,411,460	7,135,411,460
Penambahan Modal Disetor	-	-	-	-
Dana Sosial	-	-	(16,785,037)	(16,785,037)
Bonus/Tantiem Dewan Komisaris	-	-	(20,142,044)	(20,142,044)
Bonus/Tantiem Direksi	-	-	(48,340,906)	(48,340,906)
Pembagian Dividen	-	-	(750,000,000)	(750,000,000)
Penambahan Laba Tahun Berjalan			1,250,881,757	1,250,881,757
Saldo 31 Desember 2023	4,348,000,000	1,000,000,000	2,203,025,230	7,551,025,230
Penambahan Modal Disetor	93,000,000			93,000,000
Dana Sosial	-	-	(18,763,226)	(18,763,226)
Bonus/Tantiem Dewan Komisaris	-	-	(16,886,903)	(16,886,903)
Bonus/Tantiem Direksi	-	-	(67,547,614)	(67,547,614)
Pembagian Dividen	-	-	(898,000,000)	(898,000,000)
Penambahan Laba Tahun Berjalan			1,002,897,477	1,002,897,477
Saldo 31 Desember 2024	4,441,000,000	1,000,000,000	2,204,724,963	7,645,724,963

LAPORAN ARUS KAS

Nama Rekening	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Ribuan Rp)	(Ribuan Rp)
I. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	4,373,362,952.00	4,531,159,044.00
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	408,821,840.00	375,450,675.00
Penerimaan beban klaim asuransi	0.00	0.00
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	75,000,000.00	25,000,000.00
Pendapatan operasional lainnya	255,387,268.00	135,654,890.00
Pembayaran beban bunga	(1,221,206,842.00)	(1,144,744,926.00)
Beban gaji dan tunjangan	(1,615,979,206.00)	(1,578,644,350.00)
Beban umum dan administrasi	(1,093,287,939.00)	(905,133,502.00)
Beban operasional lainnya	(51,926,933.00)	(46,458,499.00)
Pendapatan non operasional lainnya	10,480,000.00	28,740,000.00
Beban non operasional lainnya	(4,370,000.00)	(4,750,000.00)
Pembayaran pajak penghasilan	(133,383,663.00)	(165,391,575.00)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	92,984,196.00	44,002,073.00
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	0.00	0.00
Kredit yang diberikan	(1,237,214,134.00)	(1,307,437,648.00)
Agunan yang diambil alih	0.00	0.00
Aset lain-lain	96,302,319.00	(90,293,496.00)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	34,495,410.00	29,844,325.00
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas		
Liabilitas segera	41,149,605.00	(42,530,616.00)
Tabungan	5,664,466.00	749,703,087.00
Deposito	1,356,083,192.00	1,303,083,890.00
Simpanan dari bank lain	0.00	0.00
Pinjaman yang diterima	(33,087,792.00)	(313,657,893.00)
Liabilitas imbalan kerja	38,074,854.00	4,927,982.00
Liabilitas lain-lain	(9,900,448.00)	23,212,252.00
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0.00	0.00
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	1,387,449,145.00	1,651,735,713.00
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(69,014,000.00)	(81,391,350.00)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0.00	(8,000,000.00)
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0.00	0.00
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0.00	0.00
Penyesuaian lainnya	176,235,620.00	181,685,374.00
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	107,221,620.00	92,294,024.00
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai	0.00	0.00
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai	93,000,000.00	0.00
Pembayaran dividen	(1,001,197,743.00)	(835,267,987.00)
Penyesuaian lainnya	0.00	0.00
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(908,197,743.00)	(835,267,987.00)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	586,473,022.00	908,761,750.00
Kas dan setara Kas awal periode	10,789,801,156.00	9,881,039,406.00
Kas dan setara Kas akhir periode	11,376,274,178.00	10,789,801,156.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR "ARTHA NUGRAHA"		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
PERIODE 31 DESEMBER 2023 DAN 2024		
U R A I A N	Tahun 2024 (Ribuan Rp.)	Tahun 2023 (Ribuan Rp.)
1 PENEMPATAN PADA BANK LAIN		
Rekening Giro Pada Bank BJB	27,985,576	1,011,263,850
Rekening Simpanan Pada Bank Jatim	898,618,876	1,971,211,632
Rekening Simpanan Pada Bank Danamon	1,507,849,719	1,392,249,138
Rekening Simpanan Pada Bank Muamalat	39,119,588	27,529,131
Rekening Simpanan Pada Bank Permata	1,746,726,133	1,991,942,605
Rekening Simpanan Pada BPR Surya Artha Utama	7,251,986	
Rekening Deposito Pada Bank Jatim	30,000,000	30,000,000
Rekening Deposito Pada Bank Muamalat	1,200,000,000	0
Rekening Deposito Pada Bank BJB	1,000,000,000	200,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Hasta Krida Jaya	0	800,000,000
Rekening Deposito Pada PT.BPR Surya Artha Guna Mandiri	0	500,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Buana Citra Sejahtera	500,000,000	1,000,000,000
Rekening Deposito Pada KBPR Artha Kencana	1,000,000,000	500,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Mulyo Raharjo	1,000,000,000	500,000,000
Rekening Deposito Pada BPR Sum Adiyatra	650,000,000	650,000,000
Rekening Deposito Pada PT. BPR Bhapertim	500,000,000	
Rekening Deposito Pada Bank Mayapada	1,000,000,000	0
Jumlah	11,107,551,878	10,574,196,356
2 KREDIT YANG DIBERIKAN		
Pinjaman Installment Modal Kerja	7,449,807,401	7,782,063,426
Pinjaman Installment Investasi	117,313,973	300,703,335
Pinjaman Installment Konsumsi	4,054,071,003	2,633,950,882
Pinjaman Installment Intern	166,414,000	142,674,600
Pinjaman Reguler Modal Kerja	8,649,700,000	8,211,700,000
Pinjaman Reguler Investasi	6,000,000	120,000,000
Pinjaman Reguler Konsumsi	264,619,800	279,619,800
Jumlah	20,707,926,177	19,470,712,043
3 ASET LAIN-LAIN		
Pend. Bunga Yg Akan Diterima - Penempatan Pd Bank Lain	19,686,387	12,520,610
Pend. Bunga Yg Akan Diterima - Kredit Yang Diberikan	281,401,482	380,689,154
Pajak Dibayar Dimuka (Pph Ps 25)		
Beban Dibayar Dimuka	7,250,000	14,500,000
Lainnya	25,309,076	22,239,500
Jumlah	333,646,945	429,949,264
4 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG SEGERA DAPAT DIBAYAR		
Pph Ps 23	30,000	30,000
Pph Ps 4 (2) Tabungan & Deposito	14,430,870	13,390,142
Pph Ps 21	42,070,863	22,366,986
Titipan Nasabah	18,037,500	2,812,500
Titipan Notaris	33,135,000	28,215,000
Titipan Premi Jamsostek	4,798,050	4,538,050
Jumlah	112,502,283	71,352,678
5 PINJAMAN YANG DITERIMA		
Pinjaman Yang Diterima Dari Bank BJB	0	33,333,328
-/- Biaya Transaksi	0	245,836
Jumlah	0	33,087,492
6 PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Utang Bunga	42,271,621	38,888,609
Kewajiban Imbalan Kerja	217,269,390	179,194,536
Utang Pajak	13,063,848	26,331,734
Lainnya (Titipan Dana Sosial)	1,255,963	1,271,537
Jumlah	273,860,822	245,686,416

7 BEBAN TENAGA KERJA		
a. Gaji, Upah dan Honorarium		
Gaji dan Upah	898,069,200	833,650,300
Tunjangan Insentif	30,300,000	25,764,100
Pajak Penghasilan Karyawan	70,378,003	42,382,650
Tunjangan Jabatan	134,760,000	135,880,000
Tunjangan Operasional	42,730,000	43,980,000
THR/TAT	172,650,300	172,652,000
b. Honorarium		
Gaji Komisaris	91,227,503	106,965,200
c. Lainnya		
Lembur	0	0
Lainnya/Pegawai Kontrak	175,864,200	217,370,100
Jumlah	1,615,979,206	1,578,644,350
8 PAJAK-PAJAK		
Pajak atas Reklame	1,315,313	1,182,788
Pajak atas Kendaraan Kantor	11,554,300	19,939,500
Pajak Bumi & Bangunan	1,316,888	1,093,266
Jumlah	14,186,501	22,215,554
9 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN		
Inventaris Kantor	11,015,900	14,290,000
Kendaraan Dinas	26,790,000	25,496,400
Gedung Kantor	10,917,500	1,756,000
Jumlah	48,723,400	41,542,400
10 BEBAN BARANG DAN JASA		
Alat Tulis Kantor	28,343,700	24,592,400
Peranko/Expedisi	542,500	319,500
Telpon/Telex/Telegram	32,559,717	32,730,516
Foto Copy	1,483,500	1,603,800
Perjalanan Dinas	4,020,000	900,000
Percetakan	30,971,524	18,855,500
Penagihan	20,774,000	2,500,000
Inventaris Kecil;	556,500	2,009,000
Majalah/Perpustakaan	0	340,000
Transport	66,437,000	61,966,816
Listrik	54,177,787	48,167,404
Edukasi Perbankan	2,500,000	1,250,000
Bea Materai dan Kertas Segel	2,360,000	1,689,000
Jasa Audit	14,985,000	14,985,000
Seragam	8,671,500	8,144,600
Logistik lain-lain	78,707,000	77,272,000
Keamanan	9,100,000	8,200,000
Pemeliharaan Core Banking	18,360,000	20,910,000
Pemeliharaan Web Site	1,200,000	1,200,000
Jumlah	375,749,728	327,635,536
11 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Rapat	25,683,500	21,055,500
Iklan	1,250,000	1,250,000
Administrasi Rekening	1,016,600	1,318,201
Iuran Organisasi	9,000,000	9,000,000
Selisih Kas	5,152	11,536
Pungutan OJK	14,971,681	13,823,262
Jumlah	51,926,933	46,458,499
12 BEBAN NON OPERASIONAL		
Peringatan Hari Besar	4,250,000	4,450,000
Lainnya	120,000	300,000
Jumlah	4,370,000	4,750,000

13 INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

ASET :

Kredit Yang Diberikan	13,838,872	0
-----------------------	------------	---

KEWAJIBAN :

Tabungan	600,655,617	594,664,458
----------	-------------	-------------

Deposito	1,967,500,000	1,469,500,000
----------	---------------	---------------

14 REKENING ADMINISTRATIF

Tagihan Komitmen

a. Fasilitas Pinjaman Yang Diterima Yang Belum Ditarik	0	0
--	---	---

b. Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
-----------------------------	---	---

Kewajiban Komitmen

a. Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik	0	0
---	---	---

b. Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
----------------------------------	---	---

c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
-------------------------------	---	---

Tagihan Kontinjensi

a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
--	--	--

1) Bunga Kredit Yang Diberikan	612,876,721	411,971,682
--------------------------------	-------------	-------------

2) Bunga Penempatan Pada Bank Lain	0	0
------------------------------------	---	---

b. Aset Produktif Yang Dihapusbuku	0	0
------------------------------------	---	---

1) Kredit yang Diberikan	228,946,438	293,946,438
--------------------------	-------------	-------------

2) Penempatan pada Bank Lain		0
------------------------------	--	---

3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	53,868,765	69,168,765
--	------------	------------

4) Pend. Bunga Atas Penempatan Dana pd Bank Lain yang Dih	0	0
---	---	---

c. Agunan Dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
--	---	---

d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
--------------------------------	---	---

Kewajiban Kontinjensi	0	0
-----------------------	---	---

Rekening Administratif Lainnya	0	0
--------------------------------	---	---

Jumlah Tagihan Komitmen Dan Kontinjensi	895,691,924	775,086,885
---	--------------------	--------------------

15 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN**

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2021
Tanggal : 10 Maret 2021

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40266 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

No.: 00090/3.0420/AU.2/07/0388-4/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR ARTHA NUGRAHA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR ARTHA NUGRAHA**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan Keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN**

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2021
Tanggal : 10 Maret 2021

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Moh. Wildan & Adi Darmawan



Adi Darmawan Ervanto, CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik – AP.0388
Nomor Izin Kantor Akuntan Publik – KEP-139/KM.1/2021



00090

Malang, 20 Maret 2025

INFORMASI LAIN

A. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dalam penyusunan laporan keuangan PT. BPR Artha Nugraha menggunakan standar akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).
2. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disajikan dalam ribuan rupiah (Rp.000) dan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
3. Penempatan Pada Bank Lain
Penempatan pada bank lain berupa Giro pada bank lain, Tabungan pada bank lain dan Deposito pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal.
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif penempatan pada bank yang dibentuk merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo tabungan dan deposito pada bank lain pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitasnya berdasarkan POJK No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018.
Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan resiko kerugian yang timbul akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh dana yang ditempatkan pada bank lain.
4. Kredit Yang Diberikan
Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar baki debit bruto.
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari baki debit kredit yang diberikan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitasnya berdasarkan POJK No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018.
5. Agunan Yang Diambil Alih
Agunan milik debitur yang diambil alih oleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit dan dicatat sebesar baki debit kredit yang diambil alih.
Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeliharaan dan pengambilalihan agunan dibebankan pada beban operasional pada saat terjadinya.
Laba atau rugi yang diperoleh/diderita akibat dari realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
6. Aset Tetap dan Inventaris
Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kecuali hak atas tanah. Seluruh aset tetap disusutkan dengan tarif penyusutan sebagai berikut :

Jenis Aset	% penyusutan
Bangunan	5%
Kendaraan	25% dan 12,5%
Peralatan dan Perlengkapan	25% dan 12,5%

7. Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka dinyatakan sebesar jumlah yang dibayarkan dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan garis lurus.
8. Simpanan
Simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito dinyatakan sebesar saldo tabungan dan deposito nasabah. Biaya transaksi deposito diakui sebagai biaya yang ditanggungkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Saldo biaya transaksi sehubungan dengan deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo diakui sebagai biaya pada periode deposito dicairkan.
9. Pendapatan dan Beban Bunga
Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (accrual basis). Kecuali pendapatan bunga atas aset "non-performing" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non-performing. Pendapatan bunga atas aset non performing yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian laporan Rekening Administratif.

10. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman yang diterima diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Saldo pendapatan provisi dan komisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

11. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sampai dengan akhir tahun 2024 menggunakan tarif pasal 17 Undang-undang PPh. Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, kelebihan tersebut diakui sebagai aset.

12. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA NUGRAHA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nugroho Adi Waspodo, SE
Alamat Kantor : Jl. Raya Purwoasri No. 109 A Kec. Purwoasri Kab. Kediri
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR ARTHA NUGRAHA yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT. BPR ARTHA NUGRAHA telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR ARTHA NUGRAHA telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. BPR ARTHA NUGRAHA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. BPR ARTHA NUGRAHA ;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri, 20 Maret 2025



METERAI TEMPEL
6832AAMX237-186440

Nugroho Adi Waspodo, SE
Direktur Utama

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA NUGRAHA

Kantor Pusat :
Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri
Kab. Kediri - Jawa Timur 64154
Telp. (0354) 529145 Fax. (0354) 527604

Kantor Kas :
Jl. Raya Minggiran No. 76A Ds. Bangsongan
Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri 64183
Telp (0354) 526481

LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Arta Nugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA NUGRAHA

1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

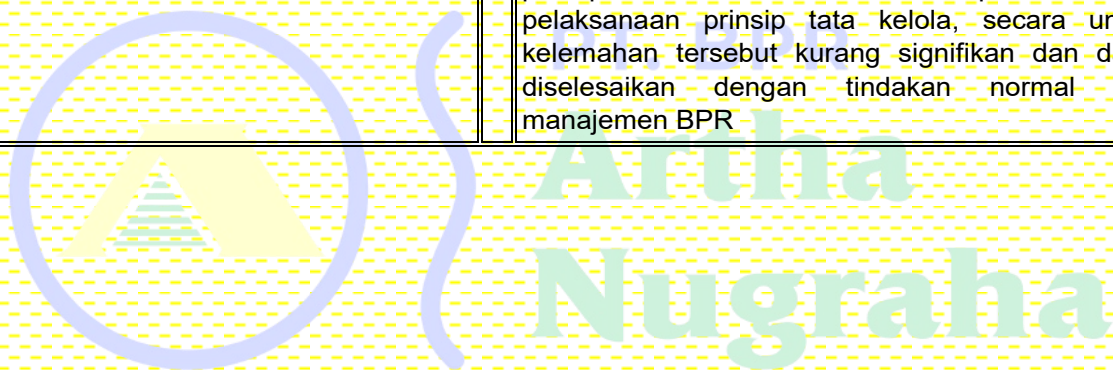
E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Arta Nugraha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Arta Nugraha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. RAYA PURWOASRI 109 A PURWOASRI, KAB. KEDIRI
Nomor Telepon	:	0354-529145
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Arta Nugraha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR



B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

(1)	Nama : NUGROHO ADI WASPODO, SE
	Jabatan : 0100 - Direktur Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan BPR. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam tugas operasional BPR dalam membawa misi pengenalan, misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas . Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan BPR/Perusahaan dan mengawasi serta mengelola transaksi usaha dan keuangan perusahaan/BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPR setiap tahun bersama-sama dengan pengawas/dewan komisaris. Mengadakan perubahan - perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku yang bersangkutan. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama Direktur sesuai dengan aturan yang ada selain Bilyet deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. Mengangkat dan memberhentikan karyawan termasuk pula menetapkan gaji dan upah karyawan dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Menandatangani surat-surat keputusan Direksi, baik secara sendiri atau bersama dengan Komisaris yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan. Membina hubungan baik dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lain, agar tercipta kerjasama dengan baik. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bertanggungjawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>

(2)	Nama : SITI UMAIYAH, SE
	Jabatan : 0200 - Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya operasional. Menyetujui pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sekaligus menanda tangani slip pencairan pinjaman. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan atau aproval terhadap transaksi harian. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca dan rugi laba harian dan bulanan. Sebagai pemegang sandi kombinasi Brankas. Menandatangani buku Tabungan. Menandatangani Bilyet Deposito sampai jumlah setinggi tingginya limapuluh juta rupiah selain Bilyet Deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Jumlah limit tersebut tidak berlaku bagi Deposito atas nama Direktur Utama PT. BPR Artha Nugraha dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical atau dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir/tidak berada di tempat. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Mewakili Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak berada ditempat.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melakukan monitoring terhadap kredit hapus buku Rek 02.81.0643.01 sehingga seluruh tagihan kreditnya bisa diselesaikan. Direksi telah membuat langkah-langkah yang lebih serius dan fokus dalam rangka menurunkan kredit bermasalah dan menurunkan NPL. Direksi telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk menurunkan NPL dan terus melakukan ekspansi kredit untuk mencapai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

1	<p>Nama : ABD. HAFIDZ IZZUDIN H</p>
	<p>Jabatan : Komisaris Utama</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, maka semua wewenang Komisaris Utama atau Komisaris lain juga berlaku baginya. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta diadakan rapat. Anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Menyetujui Rencana Kerja/Rencana Bisnis, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menyetujui kebijakan Perkreditan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang masih berlaku. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Direksi. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja atau laporan pengawasan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Terhadap kredit hapus Rek 02.81.0643.01 agar terus dilakukan monitoring sehingga seluruh tagihan kreditnya bisa diselesaikan. Direksi agar membuat langkah-langkah yang lebih serius dan fokus dalam rangka menurunkan kredit bermasalah dan menurunkan NPL. Fokus melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah untuk menurunkan NPL dan terus melakukan ekspansi kredit untuk mencapai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan. Fokus melakukan upaya penyelesaian kreit bermasalah untuk menurunkan NPL dan fokus melakukan ekspansi kredit untuk mencapai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SITI UMAIYAH, SE	-	-	-	-
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	859.000.000	19,34%	830.000.000	19,09%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	1.368.000.000	30,80%	1.322.000.000	30,40%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SITI UMAIYAH, SE	601096	PT.BPR MULYO HARJO	-
2	SITI UMAIYAH, SE	602040	PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR	-
3	NUGROHO ADI WASPODO, SE	601096	PT.BPR MULYO HARJO	4,48%
4	NUGROHO ADI WASPODO, SE	602040	PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR	1,20%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	601096	PT.BPR MULYO HARJO	-
2	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	602040	PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI UMAIYAH, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUGROHO ADI WASPODO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ABD. HAFIDZ IZZUDIN H	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	187.680.000	1	58.800.000
2	Tunjangan	2	325.499.141	1	37.208.500
3	Tantiem	2	67.547.614	1	16.886.903
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	1	0
Total Renumerasi			580.726.755		112.895.403
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	1	0
2	Transportasi	2	0	1	0
3	Asuransi Kesehatan	2	17.748.000	1	0
4	Fasilitas lainnya	2	19.237.098	1	0
Total Fasilitas Lain			36.985.098		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			617.711.853		112.895.403

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,82
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,38
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,85
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,96

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-01-18	Sosial	Pemberian bantuan untuk Partisipasi Halfah Khatmil Quran dan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW	Pondok Al Hikmah Purwoasri	500.000
2	2024-02-27	Sosial	Bantuan dana untuk Partisipasi bersih Desa Dsn Purwodadi dan Ngringin	Panitia kegiatan bersih Desa Dsn Purwodadi	200.000
3	2024-05-02	Sosial	Kegiatan dalam rangka CSR dengan pemberian beras zakat kepada fakir miskin sekitar kantor	Fakir miskin sekitar kantor BPR	8.280.000
4	2024-07-29	Sosial	Pemberian bantuan dana tunai dalam rangka partisipasi kegiatan PKD Gerakan Pemuda Ansor Kec Purwoasri	Panitia kegiatan PKD Gerakan Pemuda Ansor Kec. Purwoasri	250.000
5	2024-07-29	Sosial	Partisipasi santunan Yatim dan Dhuafa Masjid Asy Syukur Ds. Purwoasri	Panitia kegiatan santunan masjid Asyukur Purwoasri	500.000
6	2024-09-24	Sosial	Partisipasi dalam bentuk dana tunai yang digunakan sebagai bantuan pembelian cat tembok untuk Koramil Purwoasri	Koramil Purwoasri	300.000
7	2024-10-29	Sosial	Memberikan paket sembako murah untuk masyarakat sekitar kantor BPR	Masyarakat sekitar kantor BPR	8.748.800

Team Work

ORGAN



Penghargaan

PIAGAM

